



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 08 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 3 Juni 2024, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 151/F-Gerindra/DPRD/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 Perihal Pengajuan RPJPD;
 2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 043/F.PDIP/VI/2024 Tanggal 6 Juni 2024 perihal Usulan Nama-Nama Pansus RPJPD;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 04/FPG/DPRD/VI/2024 Tanggal 04 Juni 2023 Perihal Pansus Penanaman Modal;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 201/FPKS/DPRD-B/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Usulan Nama-Nama Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 03/FPD/DPRD-Banten/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 51/FKB/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Pengajuan Usulan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 05/F.PAN.DPRD/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 02/FPPP-DPRD/XI/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (RPJPD) 2025-2045;
 9. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 15/F.NasDem-PSI/DPRD-Banten/VI/2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Pajak RPJPD Banten Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
- A. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - B. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 - C. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
 - D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dilakukan Persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Juni 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7 - 08 Tahun 2024

Tanggal : 11 Juni 2024

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

NO	NAMA	UNSUR
1.	ANDRA SONI, S.M., M.AP	PIMPINAN DPRD
2.	BARHUM HS, S.IP., M.IP	PIMPINAN DPRD
3.	Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	PIMPINAN DPRD
4.	H. M. KUSWANDI, S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	Dra. ENCOP SOPIA, S.Ag., M.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	YUDI BUDI WIBOWO	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
8.	Drs. H. JAMIN, M.Si	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
9.	SRI HARTATI, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
10.	Drs. H. SYIHABUDDIN HASYIM, S.H., M.E., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. A. JAINI, S.Pd., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	Drs. H. IIP MAKMUR	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	dr. Hj. SHINTA WISHNU WARDHANI	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	H. DEDI SUTARDI, S.E., MBA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	H. IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	M. NUR KHOLIS, S.Th.I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17.	H. UMAR BIN BARMAWI, S.T., M.M	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
18.	Ir. H. TUBAGUS LUAY SOFHANI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
19.	H. UBAIDILLAH, S.E	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
20.	Prof. Dr. Ir. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M	FRAKSI NasDem PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

